

**STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN OLEH BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DI KECAMATAN KEMUNING
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023**

Oleh : Fani Lusiana

Pembimbing: Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Kecamatan Kemuning menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir yang mengalami peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) secara signifikan, untuk itu diperlukan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir agar permasalahan ini teratasi. Karhutla di Kecamatan Kemuning biasanya disebabkan karena pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat sekitar ketika datangnya musim kemarau. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui strategi pencegahan dan penanggulangan karhutla oleh BPBD Kabupaten Indragiri Hilir di Kecamatan Kemuning. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Indragiri Hilir, tepatnya di Kecamatan Kemuning atas dasar pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terjadi lonjakan kasus karhutla yang cukup tinggi. Penelitian ini menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh Fred R. David, yaitu memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan agar dapat mencapai tujuan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dari Miles and Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi BPBD Kabupaten Indragiri Hilir belum bisa dikatakan berhasil dalam penanganan karhutla, karena masih ditemukan masyarakat yang belum sadar dan mengetahui tentang risiko bencana maupun regulasi terkait karhutla. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi salah satunya keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang minim di bidangnya dan belum optimalnya pengalokasian anggaran. Kemudian, kondisi wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagian besar adalah kawasan lahan gambut sehingga sangat rawan terhadap bencana karhutla terutama disaat musim kemarau. Upaya yang dilakukan oleh BPBD untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu dengan melaksanakan berbagai strategi seperti program/kegiatan penanggulangan bencana, dimulai dari pra bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana, namun masih terdapat beberapa program/kegiatan yang pelaksanaannya dinilai kurang maksimal.

Kata Kunci: Strategi, BPBD, Penanggulangan, Bencana, Karhutla.

Abstract

Kemuning District is one of the regions in Indragiri Hilir Regency that has experienced a significant increase in forest and land fire (Karhutla) cases. Therefore, a strategy is required by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Indragiri Hilir Regency to address this issue. Karhutla in Kemuning District is usually caused by land clearing activities by local residents during the dry season. This research aims to examine the prevention and mitigation strategies for Karhutla by BPBD in Indragiri Hilir Regency, particularly in Kemuning District. The research location is in Indragiri Hilir Regency, specifically in Kemuning District, due to the significant increase in Karhutla cases in this area. This study employs the strategy theory proposed by Fred R. David, which includes formulating, implementing, and evaluating decisions to achieve goals, and it adopts a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include interviews and documentation, while the data analysis technique follows the data collection methods of Miles and Huberman.

The results show that the BPBD strategy in Indragiri Hilir Regency has not been fully successful in managing Karhutla, as there are still residents who are unaware of the disaster risks and relevant regulations related to Karhutla. Several obstacles were identified, including limited facilities and infrastructure, a lack of specialized human resources, and suboptimal budget allocation. Additionally, a large portion of Indragiri Hilir Regency consists of peatland areas, making it highly susceptible to Karhutla, especially during the dry season. Efforts by BPBD to prevent and manage Karhutla in Indragiri Hilir Regency include implementing various strategies such as disaster management programs/activities, starting from pre-disaster, emergency response, to post-disaster stages. However, there are still some programs/activities whose implementation is considered less than optimal.

Keywords: Strategy, BPBD, Management, Disaster, Forest and Land Fires.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hutan merupakan sumber daya alam yang strategis sebagai penyangga kehidupan manusia yang menawarkan banyak keuntungan. Hutan juga merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat yang nyata, seperti manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi. Di Tahun 2023 menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan, hutan di Indonesia mempunyai luas wilayah

mencapai 125,76 juta Ha atau setara dengan 62,97% dari total luas daratan Indonesia (Rizana, 2019). Tahun 2019 menurut *Global Wetlands* Indonesia tercatat memiliki lahan gambut terluas kedua di dunia setelah Brazil, yakni mencapai 22,5 juta Ha (Nugrahany, 2022). Kondisi tersebut yang menyebabkan Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam sekaligus potensi bencana.

Asian Disaster Reduction Center mendefinisikan bencana sebagai gangguan serius terhadap masyarakat

yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material, dan lingkungan (Usono et al., 2018). Sedangkan menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanganan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya bencana. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan bencana. Mitigasi bencana juga bisa dipahami sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana untuk

menghilangkan atau mengurangi akibat dari ancaman dan tingkat bencana (Wekke, 2021).

Karhutla yang sering terjadi di Indonesia biasanya disebabkan karena faktor alam dan faktor non alam. Jika dilihat dari faktor alam munculnya *ground fire* pada daerah lahan gambut dapat menyebabkan terjadinya kebakaran pada musim kemarau. Untuk faktor non alam sendiri disebabkan oleh manusia seperti memanfaatkan musim kemarau untuk membuka lahan baru dengan cara dibakar dan kelalaian yang disebabkan karena membuang puntung rokok sembarangan (Harits, 2022).

Karhutla sudah tidak asing lagi dalam beberapa wilayah di Indonesia, terutama Sumatera. Karhutla yang terjadi di Sumatera setiap tahunnya terutama di Provinsi Riau. Pada Tahun 2023 total luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau mencapai 2.111,05 Ha. Berikut data jumlah luas hutan dan lahan yang terbakar di Provinsi Riau pada Tahun 2023, yaitu:

Tabel 1
Jumlah Luas Karhutla di Provinsi Riau Tahun 2023

No.	Kabupaten	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha)
1	Bengkalis	398,29
2	Indragiri Hilir	340,75
3	Dumai	115,67
4	Rokan Hilir	238
5	Siak	50,06
6	Pelalawan	261,73
7	Kampar	193,09
8	Rokan Hulu	50,6
9	Indragiri Hulu	349,34
10	Kepulauan Meranti	39,05
11	Pekanbaru	45,97
12	Kuantan Singingi	28,5
Total:		2.111,05

Sumber: BPBD Provinsi Riau, 2023

Sepanjang Tahun 2023, karhutla merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir apalagi saat memasuki bulan kemarau. Kebakaran lahan paling luas terjadi di Tahun 2023 yakni mencapai 340,75 Ha. Salah satu penyebab rawan kebakaran di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu karena kepemilikan hutan gambut yang cukup luas mencapai 998.610 Ha, hal ini diketahui bahwa pada saat lahan gambut berada dalam keadaan kering, tanaman dan semak belukar pada lahan gambut akan lebih mudah terbakar.

Penyebab terjadinya karhutla di Kabupaten Indragiri Hilir juga dikarenakan kurangnya pemahaman arti pentingnya hutan dan dampak dari aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam membuka lahan perkebunan. Hal ini juga disebabkan pembukaan lahan dengan cara dibakar merupakan alternatif yang sangat mudah dan minim biaya untuk dilakukan, sehingga masih banyak masyarakat yang melakukannya. Faktor lain juga disebabkan karena lemahnya sanksi hukum yang berlaku (Mahendra, 2022).

Pada Tahun 2023 diketahui bahwasannya Kecamatan Kemuning merupakan salah satu kecamatan yang mengalami lonjakan kasus cukup tinggi dari yang sebelumnya tidak ada menjadi 62 Ha. Karhutla terluas terjadi di Desa Sekayan yakni mencapai 40 Ha. Desa ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Keritang, dimana Kecamatan Keritang sendiri juga termasuk salah satu kecamatan rawan karhutla,

karena kondisi daerahnya didominasi oleh kawasan lahan gambut.

Upaya penanggulangan bencana mengacu pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada Pasal 18 dimaksud mengamanatkan dibentuknya BPBD di tingkat Provinsi, Kabupaten/kota. Dalam perspektif penyelenggaraan pemerintah daerah, upaya pencegahan dan penanggulangan bencana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari urusan wajib yang menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah. Ini relevan apabila dikaitkan dengan fungsi pemerintah yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk didalamnya melakukan upaya penanggulangan bencana (Suprialdi, 2021).

Pada Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, dalam Pasal 22 secara tegas mengatur tentang tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah daerah, pemilik lahan, dan masyarakat, dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pasal ini mengamanatkan bahwa setiap orang yang memiliki, mengelola, atau menguasai lahan wajib melakukan upaya pencegahan, termasuk pemeliharaan dan pemantauan secara berkala agar tidak terjadi kebakaran.

Dalam Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan penanggulangan bencana daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana daerah dengan instansi terkait yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- c. pengkomandoan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;

- d. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi bersama instansi terkait yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- e. pembinaan dan pengawasan satuan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun langkah-langkah penanggulangan karhutla yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Indragiri Hilir, diantaranya:

Tabel 2
Rancangan Kegiatan BPBD Kabupaten Indragiri Hilir dalam Penanggulangan Karhutla Tahun 2023

Tahapan	Kegiatan
Pra Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan masyarakat yang tangguh bencana dengan dibentuknya Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk mengikuti sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana. Dengan demikian masyarakat bisa bersama-sama untuk menjaga wilayahnya. 2. Memberikan himbauan melalui brosur, spanduk, maupun sosial media mengenai bahaya karhutla dan peraturan larangan membakar hutan 3. Melaksanakan kegiatan patroli di kawasan-kawasan wilayah rawan karhutla. 4. Melakukan pemantauan titik panas (<i>hotspot</i>) setiap waktu melalui aplikasi di posko BPBD.
Saat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan status siaga darurat bencana. 2. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pada saat karhutla terjadi 3. Melaksanakan pemadaman dengan mengerahkan personel-personel dari Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD dan beberapa tim dari kepolisian, TNI, MPA, dan Masyarakat Setempat di lokasi-lokasi titik api.
Pasca Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemulihan dari fase bencana menjadi keadaan normal, dengan mengajak masyarakat melakukan pembersihan sekaligus perbaikan parit-parit, anak sungai atau sumber air bagi para petani yang digunakan ketika proses pemadaman. 2. Melakukan pengecekan ulang di lokasi untuk memastikan bahwa sumber api sudah padam.

Sumber: BPBD Kabupaten Indragiri Hilir, 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwasannya BPBD Kabupaten Indragiri Hilir sejauh ini telah memiliki langkah-langkah dalam upaya penanggulangan karhutla baik melalui proses pencegahan, tanggap darurat, dan penanganan pasca karhutla yang meliputi upaya terpadu dalam mencegah terjadinya kerusakan hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir. Namun, terdapat beberapa program yang pelaksanaannya belum berjalan optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan. BPBD Kabupaten Indragiri Hilir belum memiliki mobil pemadam kebakaran. Pada tahun 2023 untuk pengadaan selang, nozzle, dan mesin dengan target 50 unit, hanya mendapatkan masing-masing 1 unit. Selain itu, BPBD Kabupaten Indragiri Hilir juga belum memiliki *drone* pemantau yang memiliki kemampuan deteksi panas (*thermal imaging*) untuk mengidentifikasi titik api tersembunyi atau di lokasi yang sulit dijangkau. Tentu dalam hal ini sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum dapat dikatakan ideal.

Selain kendala pada sarana dan prasarana, pelaksanaan sosialisasi karhutla dan pelatihan mitigasi bencana belum sampai pada tingkat desa, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan mengikuti kegiatan tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dapat diketahui fenomena masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya Perda Kabupaten Indragiri Hilir yang diberlakukan sebagai pedoman dalam

melaksanakan penanggulangan bencana.

2. Masih rendahnya kesiapsiagaan daerah dalam rangka penanganan bencana.
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ideal dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
4. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan bencana, informasi kebencanaan, dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana.

Pelaksanaan strategi penanggulangan karhutla yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Indragiri Hilir belum terlaksana secara maksimal dan masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kasus karhutla yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya Kecamatan Kemuning. Sehingga perlu diteliti agar mengetahui bagaimana Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok yang ingin penulis bahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan

dan Lahan di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, Adapun yang menjadi tujuan adalah “Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.”

D. KERANGKA TEORI

Teori Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani “*strategos*”, yang artinya jenderal, sedangkan secara harfiah istilah ini mengacu atas suatu jaringan yang rumit dari pandangan, pendapat, pemahaman yang mendalam, pengetahuan, target, kemahiran, sejarah, kesan, dan impian yang membentuk suatu kerangka pemikiran umum agar dapat menentukan tindakan-tindakan spesifik bagi tercapainya tujuan (Yuniar et al., 2022). Definisi strategi menurut Stephanie K. Marrus yaitu sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Umar, 2001).

Menurut Fred R. David “Strategi adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya” (David, 2010). Dalam teori ini dikemukakan terdapat

beberapa tahapan dalam proses manajemen strategi, diantaranya sebagai berikut:

1) Perumusan Strategi

Tahapan dalam manajemen strategi diawali dengan melakukan sebuah perumusan strategi. Perumusan strategi didasarkan pada pencapaian visi dan misi, mengidentifikasi adanya peluang serta ancaman eksternal, identifikasi kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menentukan strategi-strategi alternatif tertentu untuk mencapai tujuan.

2) Pelaksanaan Strategi

Pelaksanaan strategi merupakan usaha untuk mewujudkan rumusan menjadi nyata. Dalam hal ini berarti mencakup pengembangan sumber daya yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, penyiapan anggaran, termasuk pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi.

3) Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dalam manajemen strategi yang memiliki tiga kegiatan pokok, diantaranya: mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan dalam perumusan strategi yang diterapkan saat ini. Kemudian melaksanakan pengukuran kinerja, dan melakukan tindakan-tindakan korektif.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian

kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah (Sudaryono, 2019). Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2009). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menganalisis dan menghasilkan data yakni berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan di Kecamatan Kemuning yang mengalami lonjakan kasus kebakaran hutan dan lahan tertinggi. Fokus pada penelitian ini adalah strategi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Jenis Data

Menurut Sugiyono, dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder (Sugiyono, 2019).

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung yang dilakukan terhadap informan mengenai strategi pencegahan dan penanggulangan karhutla oleh BPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua atau data yang diperoleh dari hasil publikasi pihak lain.

4. Sumber Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2009). Wawancara berguna untuk mendapatkan data-data dari tangan pertama (primer), serta pelengkap teknik pengumpulan data lainnya.

Tabel 3
Informan Penelitian

No.	Nama	Informan
1.	Rahmad Hadi, S.H.,MH	Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Analisis Bencana) BPBD Kabupaten Indragiri Hilir
2.	Muhammad Surya, S.Sos	Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Analisis Dampak Sosial) BPBD Kabupaten Indragiri Hilir
3.	Rismanto, S.Sos	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Indragiri Hilir
4.	Muhammad Isnaini	Camat Kecamatan Kemuning
5.	AKP Mardani Tohenes, S.H.,MH	Kapolsek Kecamatan Kemuning
6.	Sertu Muhammad Nasir Siagian	Babinsa Desa Sekayan, Kecamatan Kemuning
7.	Sumitro	Masyarakat Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning
8.	Syamsudin	Masyarakat Desa Sekayan, Kecamatan Kemuning
9.	Abdur Rohman	Masyarakat Desa Sekayan, Kecamatan Kemuning

Sumber: Olahan Penulis, 2023

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan dokumen yang berasal dari luar atau bersifat publikasi, seperti literatur buku dan jurnal-jurnal penelitian terkait (Sugiyono, 2019).

5. Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman dalam (Sugiyono, 2019), analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*)
- b. Penyajian Data (*Data Display*)
- c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perumusan Strategi BPBD Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di

Kecamatan Kemuning Tahun 2023

Rancangan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2018-2023 merupakan implementasi dari tugas dan fungsi BPBD selaku perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan penanggulangan bencana di Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki keselarasan dengan tujuan “Memantapkan Kerukunan, Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Kehidupan Sosial” dengan sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Kesiapsiagaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana”.

Dalam Renja BPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023, BPBD Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tujuan, sasaran, strategi, dan arah

kebijakan dalam rangka mengatasi kebencanaan.

Tabel 4
Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan resiko bencana dan dampak bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana 2. Memperkuat kerangka hukum penanggulangan bencana. 3. Meningkatkan tata kelola di bidang penanggulangan bencana 4. Meningkatkan kapasitas pemulihan daerah pasca bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk mekanisme koordinasi bagi pengurangan risiko maupun mitigasi bencana 2. Mengintegrasikan efektivitas sistem kedaruratan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana 3. Meningkatkan rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan BPBD Kabupaten Indragiri Hilir sebagai institusi rujukan kebijakan penanggulangan bencana 2. Mengembangkan SDM berbasis kompetensi 3. Memprioritaskan pemberdayaan masyarakat di wilayah berisiko tinggi terjadinya bencana 4. Mengutamakan kerjasama yang strategis, berkelanjutan dan mendukung kemandirian.

Sumber: Renja BPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, pada Renstra BPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 dan Renja BPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 tersebut bertujuan untuk menurunkan risiko bencana dan dampak bencana, maka sudah jelas BPBD Kabupaten Indragiri Hilir sangat berperan penting dalam mengatasi kebencanaan. Oleh karena itu, disusun beberapa strategi dalam rangka penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan tentu ada tantangan maupun hambatan yang menjadi tolak ukur kinerja BPBD Kabupaten Indragiri Hilir dalam proses perencanaan penanganan kebencanaan. Terdapat salah satu hambatan yang dialami BPBD Kabupaten Indragiri Hilir salah

satunya terbatasnya anggaran pada program kebencanaan. Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 melalui APBD Kabupaten Indragiri Hilir yang didukung anggaran sebesar Rp.10.402.785.878,- Dengan realiasi Anggaran sebesar Rp.8.795.497.687, . Sedangkan anggaran khusus pencegahan dan penanggulangan karhutla dialokasikan sebesar Rp.469.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.309.000.000,- atau sebesar 65,88%. Dengan demikian, diketahui bahwasannya anggaran yang dialokasikan belum direalisasikan secara maksimal, sehingga menyebabkan pelaksanaan di lapangan belum optimal.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan di lapangan belum optimal, seperti

keadaan dilapangan yang tidak terduga, pengelolaan sumber daya yang kurang efisien, distribusi anggaran yang tidak merata, dan minimnya koordinasi antar lembaga terkait. Selain kendala pada pengelolaan anggaran, pelaksanaan penanggulangan karhutla oleh BPBD Kabupaten Indragiri Hilir dilihat dari kondisi sarana dan prasarana yang digunakan saat ini juga belum mencukupi.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, BPBD Kabupaten Indragiri Hilir sudah melakukan perencanaan strategi dalam penanganan kebencanaan. Dimulai dari mengembangkan visi dan misi BPBD Kabupaten Indragiri Hilir, menetapkan strategi beserta sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang baik yang akan maupun sudah kejadian. Namun, disisi lain masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki BPBD Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal kebencanaan. Dengan begitu, jika strategi dibuat terstruktur dan terarah maka pelaksanaan kegiatan pun akan berjalan secara maksimal.

2. Pelaksanaan Strategi BPBD Kabupaten Indragiri Hilir dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Kemuning Tahun 2023

Berdasarkan perumusan strategi yang sudah dibuat oleh BPBD Kabupaten Indragiri Hilir dalam penyelenggaraan penanggulangan karhutla di Kecamatan Kemuning

ditetapkan mulai dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

1) Tahap Pra Bencana dalam Pencegahan Karhutla

Pada pelaksanaan program pencegahan karhutla, BPBD Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana. Kegiatan ini dilaksanakan di 8 Kecamatan, salah satunya Kecamatan Kemuning.

Gambar 1

Kegiatan Sosialisasi Karhutla di Kecamatan Kemuning Tahun 2023



Sumber: BPBD Kabupaten Inhil

Kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh BPBD Kabupaten Indragiri Hilir ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya karhutla, menghimbau agar masyarakat mematuhi peraturan-peraturan larangan membakar lahan, memberikan informasi seputar mitigasi bencana, serta melaksanakan pelatihan tanggap darurat kebencanaan. Namun, pada pelaksanaannya masih ditemukan kekurangan, yakni masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya sosialisasi terkait karhutla yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga masih ada masyarakat yang secara tidak sadar dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Selanjutnya, BPBD Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan kegiatan pemasangan pamflet untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya karhutla. Selain melalui pamflet, BPBD juga memberikan informasi melalui akun media sosial, baik melalui *Website* bpbd.inhilkab.go.id dan *Instagram* [@bpbdkab.inhil](https://www.instagram.com/bpbdkab.inhil) yang terbuka untuk publik, di media ini BPBD akan membagikan informasi kegiatan rutin dan kejadian seputar bencana yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir.

Salah satu langkah preventif yang juga dilakukan oleh BPBD Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran adalah kegiatan patroli rutin. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa kecamatan rawan karhutla bersama dengan *stakeholder* lain seperti TNI, Polri, Manggala Agni, serta masyarakat yang terlibat aktif dalam meninjau lokasi titik panas (*hotspot*) untuk memastikan bahwa potensi kebakaran bisa dideteksi dan dicegah sejak dini. Patroli ini juga bertujuan untuk memantau kegiatan masyarakat dalam membuka lahan perkebunan terutama di musim kemarau. Selain kegiatan ini, BPBD Kabupaten Indragiri Hilir juga melaksanakan pemantauan melalui aplikasi secara *real-time*.

2) Tahap Tanggap Darurat dalam Penanggulangan Karhutla

Dengan penetapan status siaga darurat yang ditetapkan oleh pemerintah, BPBD Kabupaten Indragiri Hilir sebagai instansi terkait untuk dapat mengambil langkah-langkah dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Dengan ini BPBD dan instansi terkait

dapat memobilisasi sumber daya, meningkatkan koordinasi, dan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko karhutla. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir dampak bencana, melindungi lingkungan, dan menjaga keselamatan masyarakat.

Selanjutnya, BPBD Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan operasi tanggap darurat bersama instansi terkait seperti TNI, Polri, Manggala Agni, serta relawan agar dapat mengerahkan segala upaya untuk memantau perkembangan titik api dan mengendalikan penyebarannya. Kegiatan ini merupakan bagian dari fase tanggap darurat yang bertujuan untuk mengurangi dampak bencana, mencegah meluasnya kebakaran, dan memastikan keselamatan masyarakat serta lingkungan.

Gambar 2 **Pelaksanaan Pemadaman** **Karhutla di Kecamatan Kemuning** **Tahun 2023**



Sumber: BPBD Kabupaten Inhil

3) Tahap Pasca Bencana dalam Penanggulangan Karhutla

Tahap ini merupakan tahap yang krusial dalam memulihkan kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat yang terdampak. Selain melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana karhutla, BPBD Kabupaten Indragiri Hilir juga

melaksanakan kegiatan penanganan pasca karhutla.

Fase pemulihan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk bekerja sama melakukan pembersihan lingkungan serta perbaikan infrastruktur sumber air seperti parit-parit, anak sungai, atau sumber air lainnya yang digunakan dalam proses pemadaman kebakaran agar saluran air kembali berfungsi normal untuk irigasi pertanian.

Setelah api berhasil dipadamkan secara keseluruhan, tim dari BPBD akan tetap melakukan pengecekan ulang di lokasi kebakaran untuk memastikan bahwa tidak ada sisa bara api yang masih aktif atau titik panas (*hotspot*) tersembunyi yang dapat memicu kebakaran kembali. Tim yang diturunkan kembali ke lokasi kebakaran akan memeriksa area bekas kebakaran secara visual untuk mencari tanda-tanda adanya asap, bara api kecil, atau sisa panas di permukaan tanah.

3. Evaluasi Strategi BPBD Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Kemuning Tahun 2023

Evaluasi merupakan suatu upaya pemantauan yang dilakukan untuk memastikan tercapainya target secara efektif dan efisien. Evaluasi suatu program/kegiatan dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah program/kegiatan dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal ini BPBD Kabupaten Indragiri Hilir juga melakukan evaluasi strategi terhadap

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi permasalahan yang muncul setelah pelaksanaan kegiatan, mengkaji kekuatan dan kelemahan serta memberikan upaya pemecahan masalah terhadap fenomena yang terjadi.

Selama pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana salah satunya karhutla, berdasarkan data yang diperoleh maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi BPBD Kabupaten Indragiri Hilir dalam penanggulangan karhutla yaitu diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pada Tahap Pra Bencana, BPBD Kabupaten Indragiri Hilir belum memiliki personel, sarana dan prasarana yang memadai, serta penggunaan anggaran yang belum maksimal sehingga pelaksanaannya belum merata. Belum memiliki Peta Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).
- 2) Pada Tahap Darurat Bencana, BPBD Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Tim Reaksi Cepat (TRC) yang membutuhkan keahlian khusus terlatih, lingkup kerja yang jelas, peningkatan sumber daya manusia, serta peralatan dan transportasi yang belum tersedia dengan lengkap sehingga pelaksanaan program dan kegiatan tidak maksimal.
- 3) Pada Tahap Pasca Bencana, BPBD Kabupaten Indragiri Hilir belum memiliki program dalam rangka penanganan pasca karhutla. Penanganan bencana lebih fokus pada saat kejadian

bencana, ketika bencana telah berakhir semua dianggap telah selesai, seharusnya dalam penanggulangan bencana pemulihan pasca bencana penting dilakukan terutama pemulihan lingkungan maupun penanganan asap akibat karhutla.

G. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 diperoleh kesimpulan bahwa strategi tersebut dilaksanakan dimulai dari tahap melakukan perumusan strategi dalam pencegahan karhutla dengan tujuan untuk menurunkan risiko bencana dan dampak bencana. Dalam menentukan perumusan strategi, BPBD melakukan analisis dari berbagai faktor seperti lingkungan eksternal dan internal dari organisasi. Hasil dari analisis tersebut dilakukan untuk membuat tolak ukur dalam melakukan perumusan strategi.

Pada tahap pelaksanaan strategi BPBD Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan strategi yang telah direncanakan sebelumnya dengan berkoordinasi bersama instansi pemerintah hingga masyarakat. Pada tahap pra bencana, BPBD Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana, pemasangan pamflet, dan melakukan kegiatan patroli rutin bulanan di beberapa kecamatan rawan karhutla. Pada tahap tanggap darurat, setelah penetapan status siaga darurat, BPBD

Kabupaten Indragiri Hilir sebagai instansi terkait untuk dapat mengambil langkah-langkah dalam penanggulangan bencana karhutla. Selanjutnya, melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan melakukan pemadaman api di lokasi-lokasi karhutla. Pada tahap pasca bencana, BPBD bersama masyarakat melakukan pemulihan lingkungan dengan melaksanakan pembersihan dan perbaikan sumber air yang digunakan dalam proses pemadaman dan melakukan pengecekan ulang di lokasi untuk memastikan bahwa sumber api telah padam.

Pada tahap Evaluasi Strategi BPBD Kabupaten Indragiri Hilir dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla juga melakukan evaluasi strategi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pada tahap pra bencana BPBD Kabupaten Indragiri Hilir belum memiliki personel, sarana dan prasarana yang memadai, serta alokasi anggaran belum direalisasikan secara optimal sehingga pelaksanaan kegiatan belum merata. Belum memiliki Peta Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Pada tahap darurat bencana BPBD Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Tim Reaksi Cepat (TRC) yang membutuhkan keahlian khusus terlatih, lingkup kerja yang jelas, peningkatan sumber daya manusia, serta peralatan dan transportasi yang belum tersedia dengan lengkap sehingga pelaksanaan program dan kegiatan kurang maksimal dan pada tahap pasca bencana, BPBD Kabupaten Indragiri Hilir belum memiliki program dalam rangka penanganan pasca karhutla.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, terdapat beberapa saran penulis kemukakan untuk meningkatkan strategi BPBD Kabupaten Indragiri Hilir dalam penanggulangan karhutla di Kecamatan Kemuning yakni, BPBD perlu menambah jumlah personel terlatih serta meningkatkan kompetensi personel yang ada, terutama dalam penanganan karhutla. Penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai sangat dibutuhkan agar penanggulangan kebakaran lebih efektif. Selain itu, optimalisasi dan pengelolaan anggaran perlu diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat lebih merata dan efisien di seluruh wilayah rawan kebakaran, termasuk di Kecamatan Kemuning.

Penyusunan Peta Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) BPBD harus segera disusun untuk meminimalisir dampak karhutla dan mengoptimalkan tindakan preventif. Selain itu, BPBD sebaiknya memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti TNI, Polri, Damkar, dan masyarakat setempat untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan karhutla. Koordinasi yang baik akan mempercepat respons darurat dan mengurangi dampak kebakaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu memperluas jangkauan pelaksanaan sosialisasi ke desa-desa yang jauh dari kecamatan untuk memberikan himbuan menjaga alam, bahaya karhutla, hingga larangan membakar. Serta melaksanakan pelatihan mitigasi

bencana. Pada penanganan pasca bencana, BPBD perlu mengembangkan program pemulihan pasca bencana, pemulihan lingkungan setelah karhutla sangat penting untuk mencegah bencana berulang dan memperbaiki kondisi lingkungan.

H. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahadiat, A. (2010). *Manajemen Strategik*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- David, Fred R. *Manajemen Strategis*. 12th ed. Salemba Empat: Jakarta, 2010.
- Khambali. (2017). *Manajemen Penanggulangan Bencana*. CV. Andi Offset: Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif* (32nd ed.). PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Salusu, J. (2015). *Pengambilan Keputusan Stratejik* (10th ed.). PT. Grasindo: Jakarta.
- Sudaryono. (2019). *Metodologi Penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan mix method* (2nd ed.). Rajawali Pers: Depok.
- Sudianti, D. (2022). *Manajemen Strategi* (1st ed.). CV. Pena Persada: Banyumas.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Umar, H. (2001). *Strategic Management In Action: Konsep, Teori, dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Usiono, Utami, T., Nasution, F., & Nanda, M. (2018). *Disaster Management: Perspektif*

- Kesehatan dan Kemanusiaan*. Perdana Publishing: Medan.
- Wekke, I. S. (2021). *Mitigasi Bencana* (1st ed.). CV. Adanu Abimata: Indramayu.
- Peraturan dan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
- Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Sumber lainnya:**
- Anggraini, Tri, and Dimas Agustian. "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Di Kabupaten Musi Banyuasin." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 4, no. 1 (2021): 41–46.
- Chandya, Tiwi. "Manajemen Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Di Kabupaten Ketapang." *Gorontalo Journal of Government and Political Studies* 4, no. 1 (2021): 96–103.
- Harits, Muhammad. "Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan Tanggap Darurat Pada Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Aceh Besar." Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.
- Laila, Najmi, and Zikri Alhadi. "Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Di Kabupaten Sarolangun." *Jurnal Perspektif* 3, no. 3 (2020): 379–386.
- Mahendra, Ade Febrian. "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan Di Kabupaten Indragiri Hili." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Ningtyas, Risma Violin Ayu. "Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan Di Kota Pekanbaru." Universitas Riau, 2022.
- Nugrahany, Sheila. "Potensi Pertanian Lahan Gambut Dangkal Di Provinsi Riau." In *Quo Vadis Restorasi Gambut Di Indonesia*, 56–60, 2022.
- Putri, Rossa Yuliana. "Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017." *JOM FISIP UR* 6, no. 1 (2019): 1–9.
- Rizana. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau." *Civitas* 2, no. 1 (2019): 52–63.
- Suprialdi, Ade. "Implementasi Strategi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan.” Universitas Islam Riau, 2021.
Yuniar, Vira, Meiliyana, and Apandi.
“Strategi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan.” *Administrativa* 4, no. 1 (2022): 91–100.